IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan:

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam mewujudkan keadilan harus memperhatikan 3 (tiga) nilai hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan 3 (tiga) nilai hukum itu, Surat Edaran Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010. yang merupakan bentuk dari diskresi dan penegakan hukum secara penuh (*Full Enforcement* yang) dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil. Perkara tindak pidana korupsi dapat dihentikan hanya pada tahap penyelidikan dengan memperhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Pengembalian kerugian negara pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat menggunakan TP-TGR sebagai sarana non penal untuk mengembalikan kerugian tersebut.
2. Alasan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil masih tetap dilanjutkan oleh Kejaksaan sampai tahap persidangan di pengadilan setelah diberlakukannya SE Jampidsus yaitu: pertama, perkara tersebut telah memenuhi unsur-unsur sifat ajaran melawan hukum formil dan materil yang terdapat dalam Undang-Undang pemeberantasan tindak pidana korupsi, kedua, SE Jampidsus tidak memiliki kekuatan atau dasar

hukum yang mengikat dan surat edaran tersebut multitafsir tidak memenuhi *asas lex certa*, ketiga, untuk melindungi tatanan sosial yang ada di dalam masyarakat dan terakhir, SE Jampidsus bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

B. Saran

1. Menghimbau polisi, jaksa dan hakim untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan kerugian negara yang kecil berdasarkan nilai kemanfaatan hukum agar dapat mewujudkan keadilan serta kepastian hukum.
2. Agar SE Jampidsus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010. yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus ditambahkan parameter atau tolak ukur dalam mengkatagorikan kerugian negara yang kecil sehingga tidak menimbulkan polemik dikalangan para jaksa dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan aturan baru (*Ius Constituendum*).